

Dinamika Otoritas Syariah dalam hukum perbankan Indonesia tak hanya bersifat teknis-yuridis, tetapi juga cerminan tarik-menarik legitimasi agama, akseptabilitas sosial, dan otoritas negara. Diwarnai komparasi negara muslim terpilih, buku ini menegaskan pentingnya keseimbangan prinsip legalitas, independensi, dan kompetensi otoritas fatwa. Dalam konfigurasi unik Indonesia, peran historis fatwa MUI mendapatkan pengukuhan konstitusionalnya dalam Putusan MK 2022. Namun, konsolidasi melalui *Omnibus Law* UU P2SK 2023 menimbulkan ambiguitas baru. Ini isyarat kelanjutan kontestasi politik legislasi yang terus berlangsung. Ke depan, agenda krusialnya adalah memperkuat *Sharia Governance Framework* dan kredibilitas otoritas syariah untuk memastikan *Sharia Compliance* berkelanjutan, dan menjadikannya pilar utama dalam penguatan sistem hukum ekonomi syariah Indonesia.

“ Sekalipun **negara memiliki wewenang penuh dalam membentuk hukum**, namun ketika bersentuhan dengan **penetapan hukum agama**, *in casu* perbankan syariah, **negara perlu membatasi dirinya** dengan cara menyerahkan penetapan materi hukum tersebut kepada **pemegang otoritas agama**. Dalam hal ini, **negara mengambil peran mengadopsi hukum agama** yang telah ditetapkan oleh pemegang otoritas agama menjadi hukum positif yang diberlakukan dalam penyelenggaraan urusan negara di bidang pengelolaan **perbankan syariah**. ”

*Pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Perkara No. 65/PUU-XIX/2021
Pengujian UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
dibacakan 8 Agustus 2022 tanpa Dissenting Opinion*

“ Berkenaan dengan **keberadaan Dewan Syariah Nasional** yang saat ini berada di bawah pembinaan dan pengawasan **Majelis Ulama Indonesia**, kami berpendapat bahwa sebagai suatu **lembaga independen yang berwenang mengeluarkan fatwa** atas jenis-jenis kegiatan, produk, dan jasa keuangan syariah serta **mengawasi penerapan fatwa** dimaksud oleh lembaga-lembaga keuangan syariah, maka dalam rangka **tetap menjaga independensi** Dewan Syariah Nasional, **sudah seharusnya** Dewan Syariah Nasional tetap berada di bawah Majelis Ulama Indonesia dan **bukan menjadi bagian dari instansi tertentu**. ”

*Tanggapan Pemerintah Terhadap RUU tentang Perbankan Syariah
ditandatangani Menteri Keuangan Dr. Sri Mulyani Indrawati
tertanggal 21 Maret 2007*

ISBN 978-623-88639-9-0



9 786238 863990

Penerbit **HAJA Mandiri**
www.hajamandiri.my.id

DINAMIKA OTORITAS SYARIAH DALAM HUKUM PERBANKAN INDONESIA

DINAMIKA OTORITAS SYARIAH

DALAM

HUKUM PERBANKAN INDONESIA

Studi Komparatif Beberapa Negara Muslim



ASRORI S. KARNI